

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pendidikan Indonesia tumbuh berkembang cukup pesat hasil analisis kuantitatif, namun mutu pendidikan perlu ditingkatkan agar kualitas dapat mengejar ketertinggalan dari pendidikan tinggi di negara maju. Sejarah pertumbuhan pendidikan tinggi di Indonesia (Oey-Gardiner et al., 2017), khususnya tingkat sarjana dan diploma seperti dipetakan dalam tabel 1.1.

**TABEL 1.1. PERTUMBUHAN PERGURUAN TINGGI, MAHASISWA,
DAN DOSEN MENURUT KEPEMILIKAN DAN KEMENTERIAN, 2008-2014**

	Tahun	Total	PTN	PTS	Dikbud	Agama
PERGURUAN TINGGI						
	2008	3.226	134	3.092	2.680	546
	2009	3.533	135	3.398	2.975	558
	2010	3.585	135	3.450	3.011	574
	2011	3.794	140	3.654	3.185	609
	2012	3.815	144	3.671	3.170	645
	2013	3.854	149	3.705	3.189	665
	2014	3.958	152	3.806	3.280	678
	Pertumbuhan/tahun (%)	3,41	2,10	3,46	3,37	3,61
MAHASISWA						
	2008	4.509.035	1.455.607	3.053.428	3.805.287	703.748
	2009	4.792.874	1.905.813	2.887.061	4.281.695	511.179
	2010	4.886.886	2.005.055	2.881.831	4.337.039	549.847
	2011	5.364.301	2.055.383	3.308.918	4.787.785	576.516
	2012	6.233.984	2.104.354	4.129.630	5.616.670	617.314
	2013	6.423.455	2.110.330	4.313.125	5.822.143	601.312
	2014	6.453.252	2.168.555	4.284.697	5.839.587	613.665
	Pertumbuhan/tahun (%)	5,98	6,64	5,65	7,14	(2,28)
DOSEN						
	2008	286.127	77.888	208.239	250.357	35.770
	2009	261.652	76.437	185.215	228.781	32.871
	2010	266.324	79.408	186.916	233.390	32.934
	2011	238.137	77.502	160.635	207.507	30.630
	2012	224.502	71.819	152.683	192.944	31.558
	2013	237.520	76.552	160.968	206.641	30.879
	2014	257.586	99.535	158.051	230.915	26.671
	Pertumbuhan/tahun (%)	(1,75)	4,09	(4,60)	(1,35)	(4,89)

SUMBER: BPS, STATISTIK INDONESIA, TAHUNAN

Pertumbuhan kuantitas ditunjukkan oleh perkembangan jumlah perguruan tinggi dan mahasiswa. Jumlah perguruan tinggi tumbuh cukup pesat, baik yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama. Kecenderungan tersebut didorong oleh peran pihak swasta. Berdasarkan data BPS 2008–2014, secara keseluruhan jumlah perguruan tinggi tumbuh 3,41 persen per tahun. Angkanya berada di atas pertumbuhan perguruan tinggi negeri (PTN) yang mencapai 2,1 persen, tapi sedikit lebih rendah dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta (PTS) yang tumbuh pada tingkat 3,46 persen.

Pertumbuhan paling pesat dialami oleh perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama (3,61 persen). Namun, jika keberadaan dosen merupakan indikator mutu (sebagaimana digunakan dalam pemeringkatan perguruan tinggi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi), pertumbuhan negatif jumlah dosen merupakan kabar buruk yang bisa menghambat perbaikan mutu sebagian besar mahasiswa.

Pada periode yang sama, jumlah mahasiswa secara keseluruhan juga bertambah sebanyak 1,9 juta orang atau bertumbuh sebesar 6,0 persen per tahun. Angka itu lebih rendah dari pertumbuhan mahasiswa PTN (6,6 persen), tapi lebih tinggi dari pertumbuhan mahasiswa PTS (5,7 persen). Padahal, penambahan jumlah PTS lebih pesat daripada PTN. Fenomena yang memerlukan perhatian adalah pertumbuhan yang tidak seimbang antara jumlah mahasiswa perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Jika mahasiswa perguruan tinggi Kemendikbud

tumbuh hingga menyentuh 7,1 persen, jumlah mahasiswa perguruan tinggi agama turun drastis, hingga minus 2,3 persen. Diperkirakan hal ini terkait dengan pasar tenaga kerja yang lebih mudah dimasuki oleh lulusan perguruan tinggi umum. Hipotesis ini tentu saja perlu diteliti lebih mendalam.

Keunggulan PTN sangat nyata pada perkembangan jumlah dosen yang gajinya menjadi tanggungan negara. Ini berbeda dengan PTS yang pendanaannya sangat mengandalkan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari mahasiswa. Oleh karena itu, biaya SPP di PTS hampir pasti lebih tinggi dibandingkan dengan PTN. Uang SPP di PTS diperlukan untuk dana operasional pendidikan, sedangkan di PTN dana tersebut dapat digunakan untuk tambahan pengadaan sarana dan prasarana. Tidak aneh bila calon mahasiswa memprioritaskan penerimaan di PTN daripada di PTS karena biaya kuliahnya lebih murah.

Data jumlah dosen tidak secara tegas menunjukkan arah perkembangan (tren), data menunjukkan ketidakkonsistenan dalam arah perkembangan dengan turun dan naiknya jumlah dosen dari tahun ke tahun. Dengan membandingkan angka di awal dan akhir periode, dapat disimpulkan bahwa jumlah dosen antara 2008 dan 2014 sedikit menurun, dari 286 ribu menjadi 258 ribu orang atau secara rata-rata turun sebanyak 1,8 persen per tahun.

Hanya jumlah dosen PTN yang tumbuh pesat dari 78 menjadi 100 ribu orang atau 4,1 persen per tahun, sedangkan dosen PTS mengalami penurunan sekitar 50 ribu orang dari 208 ribu orang pada 2008 menjadi hanya 158 ribu orang pada 2014. Sementara itu, antara 2008 dan 2014, jumlah perguruan tinggi swasta meningkat sebanyak 714 buah dan jumlah mahasiswa meningkat dengan angka

lebih dari 2 juta orang. Adapun, ihwal PTS, Wirosuhardjo (2014) mengingatkan perlunya memperhatikan kebutuhan PTS karena mereka cukup besar perannya dalam “mencerdaskan bangsa”. Oleh karena itu, PTS harus dirangkul, jangan dibiarkan diolok-olok lantaran, misalnya, kampusnya berada di ruko dan miskin fasilitas, termasuk minim dosen.

Berkurangnya dosen di PTS terjadi pada perguruan tinggi di bawah Kemendikbud maupun Kemenag. Bila pada perguruan tinggi umum berkurang 1,4 persen, pada perguruan tinggi keagamaan turun hingga 4,9 persen. Faktor penyebab menurunnya jumlah dosen itu perlu dipelajari sebagai dasar pengembangan kebijakan. Misalnya, perlu dipertanyakan alasan kebijakan yang mewajibkan perguruan agama menghasilkan ratusan doktor, sedangkan banyak mahasiswa dan dosen meninggalkan kampus keagamaan terutama kampus swasta, walaupun, secara umum jumlah perguruan tinggi dan mahasiswa bertambah. Data di atas bisa jadi mencerminkan pergeseran pasar tenaga kerja. Sebab, bagi sebagian besar penduduk, pendidikan ditujukan untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa meningkatkan kesejahteraan dan status sosial.

Perubahan orientasi pembelajaran berawal dari hasil penelitian seorang guru pendidikan dasar di negara maju mengenai cara pengajaran yang lebih baik. Salah satu temuannya adalah menggeser pendekatan pembelajaran dari yang sebelumnya terpusat di guru menjadi terpusat pada siswa. Pendekatan itu kini telah diterapkan secara luas pada tingkat pendidikan tinggi. Dalam pembelajaran, metode apa yang lebih menggugah mahasiswa untuk belajar sendiri? Pertanyaan tersebut membuat peran dosen dan mahasiswa berubah. Dosen bukan lagi

merupakan satu-satunya sumber ilmu dan mahasiswa harus berubah dari pasif menjadi aktif dalam mencari informasi dan pengetahuan tambahan.

Menjawab perubahan yang terjadi, pemerintah telah mengharuskan semua perguruan tinggi menerapkan prinsip pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa. Untuk itu, pemerintah menyediakan bahan pelatihan buat melaksanakan metode pembelajaran baru yang terpusat pada mahasiswa. Namun, disayangkan bahwa sebagian besar bahan yang tersedia merupakan salinan dari bahan latihan yang dikembangkan di luar negeri tanpa dasar pengetahuan yang diperoleh dari penelitian ilmiah tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam kelas perguruan tinggi Indonesia.

Ketika pembelajaran berpusat pada dosen, mereka dianggap sebagai sumber kebenaran dan pengetahuan. Dosen memberi kuliah dan mahasiswa mencatat sebanyak mungkin kata-kata yang diucapkan dosen. Jarang atau belum ditemukan mahasiswa yang mengkritik atau melawan pendapat dosen berdasarkan pengetahuan atau informasi yang diperolehnya sendiri. Dalam sistem pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa, peran dosen berubah menjadi fasilitator dengan tetap menguasai bidang yang sedang diampunya. Selain itu, materi bahan ajarnya berubah. Sebelumnya bahan ajar terpusat hanya pada pengetahuan dalam buku kuliah. Kini, dosen harus mengajarkan mahasiswa agar memiliki kemampuan belajar sendiri, berpikir kritis, menulis, berjiwa usahawan, hingga mahir berkomunikasi. Salah satu cara untuk menambah mutu pendidikan adalah dengan memperbaiki kurikulum.

Dalam perjalanannya, pengembangan kurikulum perguruan tinggi diarahkan oleh pemerintah dengan pengaturan yang makin ketat di mana kepatuhan dipastikan melalui penilaian untuk akreditasi, yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN). Menurut Kemendiknas: “Kurikulum pendidikan tinggi adalah rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.” (No. 232/U/2000).

Uraian lain mengatakan bahwa kurikulum merupakan pengejawantahan tujuan (goal) proses belajar-mengajar pada tingkat program studi secara konsep. Oleh karenanya, pencapaiannya dijalankan sebagai sasaran (objective) dan masih juga diperinci menjadi ciri-ciri (*trait*), yang menjadi pedoman merancang program pengajaran mata kuliah yang sekarang terdiri atas Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP), Silabus, dan Satuan Acara Pengajaran (SAP), menerapkan metode pembelajaran terpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*).

Pada awalnya ditentukan UU 22/1961 (tentang perguruan tinggi) yang telah meletakkan dasar struktur perguruan tinggi sebagaimana kita kenal hari ini (tabel 1.2), salah satu syarat penting ketika itu adalah keharusan kurikulum yang dirancang berbasis Pancasila dan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Penetapan Presiden 19/1965 serta Perpres 14/1965.

Tabel 1.2. Sejarah Perjalanan Kurikulum Pendidikan Tinggi Indonesia

No	Uraian	Peraturan
1.	Kurikulum yang berbasis pada Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila	UU No. 22 Tahun 1961, Penetapan Presiden No. 19 Tahun 1965 , Perpres no. 14 Tahun 1965

2.	Kurikulum diatur Pemerintah	UU No. 2 Tahun 1989, PP No. 60 Tahun 1999
3.	Pergeseran paradigma ke konsep KBK, kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi	(UU No. 20 Tahun 2003 pasal 38 ayat 3 dan 4, Kepmendiknas No. 232/U/2000, dan perubahan kurikulum inti di Kepmendiknas No 045/U/2002)
4.	Kurikulum dikembangkan oleh PT sendiri	(PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 17 ayat 4, PP 17 Tahun 2010 pasal 97 ayat 2)
5.	Dikembangkan berbasis kompetensi	(PP No. 17 Tahun 2010 pasal 97 ayat 1)
6.	Minimum mengandung lima elemen kompetensi	(PP No. 17 Tahun 2010 pasal 17 ayat 3)
7.	Capaian Pembelajaran sesuai dengan Level KKNI	(UU PT No. 12 Tahun 2012 pasal 29)
8.	Kompetensi lulusan ditetapkan dengan mengacu pada KKNI	(UU PT No. 12 Tahun 2012 pasal 29)
9.	Standar Nasional Pendidikan Tinggi	Permenristek dan Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, lampiran.

(Kurikulum Nasional Berbasis Kompetensi, Mengacu Pada KKNI Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (28 April 2016))

Sejak awal abad ini, terjadi pergeseran dalam proses belajar-mengajar pada tingkat pendidikan tinggi. Dapat dikatakan bahwa perubahan mendasar terletak pada fokus proses tersebut, yang mengarah ke pemikiran sebagaimana dikemukakan Galileo Galilei (1564–1642). Sementara sebelumnya pengajaran terpusat pada guru pada pendidikan dasar hingga menengah dan pada dosen di tingkat perguruan tinggi, karena mereka dianggap ”mahatahu” dan menyampaikan pengetahuannya pada pendengarnya (audience), penerapan paradigma Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) mengubah tujuan pengajaran menjadi terpusat pada kebutuhan pendengar atau siswanya, agar memiliki kompetensi ketika lulus.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.

Pergeseran paradigma dari terpusat pada guru dan dosen ke siswa dan mahasiswa (*from teacher centered to student centered learning*) sebenarnya bukan gejala baru. Hanya, metode belajar mengajar yang terpusat pada siswa/mahasiswa makin luas diterima dan diterapkan dan diyakini akan menjadi pengarah ke hari depan. Keunggulan paradigma baru ini juga diyakini pemerintah yang mengembangkannya untuk diterapkan di Indonesia juga. Namun, patut disayangkan bahwa perubahan hanya didasari peraturan tanpa mengetahui keadaan yang berlaku berdasarkan data yang diperoleh secara ilmiah sebagaimana dilakukan dan dilaksanakan di luar negeri. Hingga kini pun belum ada penelitian ilmiah tentang keunggulan perubahan paradigma proses dan prosedur belajar-mengajar. Yang ada adalah dikeluarkannya peraturan bertubi-tubi tanpa diketahui hasil dari perubahan sebelumnya. Dalam kenyataannya, tidak banyak dosen yang mengetahui arti metode pembelajaran baru itu, apa yang seharusnya dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Terutama lagi tidak ada keterangan tentang kelebihan dan kekurangan bagi dosen dan mahasiswa dari metode lama ke baru.

Pengembangan kurikulum merupakan hak dan kewajiban masing-masing perguruan tinggi, namun demikian dalam pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus berlandaskan mulai dari UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2012 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, serta ketentuan lain yang berlaku. Kurikulum seharusnya mampu

menghantarkan mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, serta membentuk budi pekerti luhur, sehingga dapat berkontribusi untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan, mendorong semangat kepedulian kepada sesama bangsa dan umat manusia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan serta kejayaan bangsa Indonesia.

Kurikulum pendidikan tinggi adalah rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi, (Permendikbud No. 3 Tahun 2020).

Definisi ini mengisyaratkan bahwa program studi menentukan terdahulu tujuan hasil didikannya yang tentu saja pada gilirannya berpedoman pada visi dan misi institusi lebih besar. Tujuan tersebut menentukan mata kuliah (atau pilihan dari kelompok mata kuliah) serta persyaratan lain apa saja yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat lulus.

Perubahan mendasar dari pengarahannya di atas terletak pada pengertian bahwa kurikulum merupakan rencana dan pengaturan. Hal ini dikatakan karena sebelumnya sering terdengar bagaimana keputusannya doktor baru menjanjikan pengadaan mata kuliah baru, tidak pasti membangun suatu kesatuan bersama mata kuliah lain yang sudah ada. Hal ini merupakan pertanda bagaimana pasar pendidikan tinggi merupakan pasar penawaran.

Berdasar pada pemahaman gambaran karakter sumber daya di atas, dosen wajib mengerti tentang berbagai rumpun ilmu agar dapat memahamkan kepada mahasiswa bahwa pengelolaan sumber daya secara optimal memerlukan ilmu

pengetahuan, keterampilan dan sikap mental serta etika yang dilandasi karakter terpuji. Pada pemikiran ini, selanjutnya semua bidang ilmu dapat disampaikan dengan materi perkuliahan yang dianggap paling sesuai dalam suatu kerangka pembelajaran terintegrasi yang mencakup tiga hal, yaitu integrasi komponen Tridarma, integrasi penyelesaian interdisiplin dan integrasi penyemaian tiga aspek ilmu, keterampilan dan sikap (IKS) dengan orientasi sikap yang mengarah pada pembentukan karakter Negara telah menetapkan enam rumpun ilmu untuk kategorisasi kelompok ilmu-ilmu yang dikembangkan dan diamalkan dalam rangka pencapaian masyarakat berkualitas berkelanjutan (*sustainable quality*) yang perwujudan masyarakat tersebut tecermin pada cita-cita bangsa yang ringkasannya diungkapkan sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumpun-rumpun ilmu tersebut adalah ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan.

Perubahan kurikulum juga berarti perubahan pembelajarannya, sehingga dengan konsep di atas proses pembelajaran yang dilakukan di pendidikan tinggi tidak hanya sekedar suatu proses *transfer of knowledge*, namun benar-benar merupakan suatu proses pembekalan yang berupa *method of inquiry* seseorang yang berkompeten dalam berkarya di masyarakat. Dengan demikian secara jelas akan tampak bahwa perubahan kurikulum dari kurikulum berbasis penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan (KBI) sesuai Kepmendikbud No.056/U/1994, ke KBK menurut Kepmendiknas No. 232/U/2000, mempunyai beberapa harapan keunggulan, yaitu : "luaran hasil pendidikan (*outcomes*) yang diharapkan sesuai dengan *societal needs, industrial/business needs, dan professional needs; dengan*

pengertian bahwa *outcomes* merupakan kemampuan mengintegrasikan *intellectual skill, knowledge dan afektif* dalam sebuah perilaku secara utuh.” Beberapa perubahan konsep dari kurikulum berbasis isi (Kepmendikbud 056/U/1994) ke Kurikulum berbasis kompetensi (Kepmendiknas no. 232/U/2000 dan 045/U/2002) dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3 Perubahan Konsep Kurikulum

PERUBAHAN KONSEP KURIKULUM			
No	TINJAUAN	KURIKULUM BERBASIS ISI (KURNAS 1994)	KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (2000)
1	Latar belakang perubahan	Masalah internal	Masalah global
2	Basis kurikulum	Berbasis isi (Content Based Curricullum)	Berbasis kompetensi (Competency Based Curricullum)
3	Luaran PT	Kemampuan minimal sesuai sasaran kurikulumnya	Kompetensi yang dianggap mampu oleh masyarakat.
4	Penilai kualitas lulusan	Perguruan tinggi sendiri	Perguruan Tinggi dan pengguna lulusan/ stakeholders.
5	Cara menyusun	Mulai dari isi keilmuannya	Mulai dari penetapan profil lulusan dan kompetensi
6	Penekanan	Output , lebih banyak menekankan hard skill	Outcome, keseimbangan hardskill dan softskill
7	Pembelajaran	Teacher centered learning (TCL), dengan titik berat pada transfer of knowledge	Student centered learning (SCL), diarahkan pada pembekalan method of inquiry and discovery

Kompetensi lulusan bisa didapat lewat kajian terhadap tiga unsur yaitu nilai-nilai yang dicanangkan oleh perguruan tinggi (*university values*), visi keilmuan dari program studinya (*scientific vision*), dan kebutuhan masyarakat pemangku kepentingan (*need assesment*). Kompetensi ini terbagi dalam tiga katagori yaitu kompetensi utama; kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya, yang kesemuanya akhirnya menjadi rumusan kompetensi lulusan. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa kompetensi utama merupakan kompetensi penciri lulusan sebuah program studi, sedangkan kompetensi pendukung adalah

kompetensi yang ditambahkan oleh program studi sendiri untuk memperkuat kompetensi utamanya dan memberi ciri keunggulan program studi tersebut. Sedang kompetensi lainnya adalah kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi/ program studi sendiri sebagai ciri lulusannya dan untuk memberi bekal lulusan agar mempunyai keluasaan dalam memilih bidang kehidupan serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Menurut pendapat ahli, bahwa: *“Competencies are developed based on the feedback and contribution from all stakeholders involved, that is, students, teachers, and community partners (Clark, 1976; Johnstone & Soares, 2014; O’Connell & Moomaw, 1975).*

Tujuan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, yaitu mempersiapkan calon sarjana yang dapat memenuhi tuntutan kualitas dan relevansi dalam menghadapi persaingan global untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia dan keterampilan secara mandiri. Tujuan tersebut dapat memberi makna bahwa tugas pendidikan adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkarakter dan memiliki kompetensi, kemandirian, kemampuan kerja sesuai bidang keahliannya. Pemberlakuan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan adanya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang SNP, maka pengembangan sistem penilaian sebagai akibat dari Kurikulum KBK yang berimplikasi terhadap sistem pembelajaran berbasis kompetensi dan bernilai karakter. Evaluasi penilaian skor pencapaian kompetensi dapat dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan setelah pembelajaran dilaksanakan.

Sistem evaluasi hasil belajar di STIA Banten bertujuan untuk menilai dan mengukur tingkat kemampuan mahasiswa. Pencapaian penguasaan kompetensi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai dasar penilaian, yang dapat diukur dari pencapaian kecakapan yang lebih tinggi. Penilaian dalam model pembelajaran berbasis kompetensi yang dikembangkan, lebih menekankan pada pencapaian kompetensi peserta didik aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang dirancang sebagai acuan dalam memberikan skor atas kemampuan mahasiswa terhadap materi.

Pengembangan model pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian adalah model pembelajaran mata kuliah perpajakan berbasis kompetensi. Pembelajaran di STIA Banten sebagian sudah menerapkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), sehingga terjadi beberapa perubahan mendasar pada perangkat pembelajaran mulai dari standar kompetensi, kompetensi dasar, silabus, satuan acara perkuliahan, metode pembelajaran sampai pada sistem evaluasi dan penilaian hasil belajar. Pemahaman perangkat pembelajaran dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: (1) aspek mengajar dosen, yaitu bagaimana proses pembelajaran dapat terlaksana; dan (2) aspek hasil belajar mahasiswa, yaitu bagaimana capaian tujuan pembelajaran yang diinginkan melalui proses pembelajaran (Muchith, 2008:33).

Pembelajaran merupakan sistem yang terdiri atas beberapa unsur, yaitu: masukan, proses dan hasil. Pengembangan model pembelajaran di STIA Banten sebagai sumber belajar secara teori (pengembangan aspek afektif dan kognitif) dan praktek (pengembangan aspek psikomotorik) yang dilaksanakan oleh dosen

akademisi dan praktisi bertujuan untuk mengukur hasil belajar dan kompetensi/kemampuan mahasiswa di bidang perpajakan. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kurikulum KBK, mengubah strategi pembelajaran dari satu dosen untuk satu mata kuliah perpajakan menjadi dua dosen (dosen akademisi dan dosen praktisi) upaya meningkatkan hasil belajar dan kompetensi mahasiswa. Evaluasi hasil belajar sebagai acuan penilaian dalam proses pembelajaran untuk pencapaian tujuan dan hasil penilaian kompetensi sebagai acuan setiap individu setelah dilaksanakan (uji kompetensi).

Mengacu pada beberapa bentuk penilaian berbasis kompetensi, penilaian dirancang dalam bentuk rubrik penyekoran yang mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan etika yang harus dimiliki mahasiswa dalam proses pembelajaran. Rubrik adalah suatu hirarki dari standar yang digunakan untuk pencapaian kompetensi mahasiswa, rubrik memuat daftar kriteria kemampuan dan keterampilan dalam pencapaian kompetensi yang diukur pada setiap pembelajaran.

B. Pembatasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian dibatasi dalam pengembangan model pembelajaran mata kuliah perpajakan berbasis kompetensi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Bisnis di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten.

C. Masalah Penelitian

Peneliti melakukan observasi awal dengan mewawancarai Ketua Jurusan, Dosen dan Mahasiswa tentang proses pembelajaran mata kuliah perpajakan, maka terdapat beberapa masalah, yaitu:

1. Bahan ajar yang disampaikan kepada mahasiswa terdiri dari kumpulan materi-materi campuran (kompilasi) belum disusun secara sistematis ke dalam modul.
2. Hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah perpajakan masih rendah dan standar kompetensi lulusan belum tercapai.
3. Pembelajaran praktek belum dilaksanakan secara optimal, sehingga pemahaman mahasiswa masih kurang.
4. Pembelajaran mata kuliah perpajakan belum sesuai dengan isi struktur kurikulum berbasis kompetensi.
5. Hasil uji kompetensi perpajakan mahasiswa yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi perpajakan (LSKP) belum tercapai.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah penelitian tersebut di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengembangkan model pembelajaran mata kuliah perpajakan berbasis kompetensi di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten?
2. Bagaimana kelayakan model pembelajaran mata kuliah perpajakan berbasis kompetensi di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten?
3. Bagaimana efektifitas model pembelajaran mata kuliah perpajakan berbasis kompetensi di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses pembelajaran mata kuliah Perpajakan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten sebagai berikut:

1. Mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pengembangan model pembelajaran mata kuliah perpajakan berbasis kompetensi.
2. Menganalisis kelayakan model pembelajaran mata kuliah perpajakan berbasis kompetensi dari hasil pengembangan.
3. Mengetahui efektivitas model pembelajaran mata kuliah perpajakan berbasis kompetensi dari hasil Kelayakan.

F. Signifikansi Penelitian

Penelitian pengembangan model pembelajaran mata kuliah perpajakan berbasis kompetensi untuk meningkatkan hasil belajar dan kompetensi mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten. Proses pembelajaran dikembangkan dengan dengan beberapa model pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar dan capaian kompetensi mahasiswa serta dosen sebagai fasilitator lebih efektif dalam menyampaikan materi belajar. Pentingnya penelitian pengembangan model pembelajaran mata kuliah perpajakan berbasis kompetensi, yaitu: 1) untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada setiap komponen pembelajarannya; 2) untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan belajar; 3) untuk efektivitas pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang mudah dipahami oleh mahasiswa.

G. Kebaruan Penelitian

Tabel 1.4 Kebaruan Penelitian

No	Judul Artikel	Nama Jurnal	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	<i>Using the ADDIE Model of Instructional Design to Teach Chest Radiograph Interpretation</i>	<i>Journal of Biomedical Education</i> Volume 2016, Article ID 9502572, 6 pages http://dx.doi.org/10.1155/2016/9502572	Lawrence Cheung	Hasil penelitian dengan Model ADDIE yang digunakan dan diterapkan untuk kurikulum yang mengajarkan pengetahuan, keterampilan, atau sikap.	Model ADDIE mudah digunakan dan dapat diterapkan kurikulum yang mengajarkan pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Tetapi terlepas dari model yang digunakan, terstruktur, komprehensif pendekatan pengembangan kurikulum akan membantu pendidik dalam memenuhi kebutuhan peserta didiknya.
2.	<i>The Development of Message-Design Model in Blended Learning</i>	<i>The Asian Journal of Technology Management</i> Vol. 10 No. 1 (2017): 1-9	Ulfia Rahmi, Z. Mawardi Effendi, Mohd. Ansyar, dan Jasrial	Hasil penelitian pengembangan terdiri dari (1) buku pesan desain model dalam blended learning, dan (2) perangkat pembelajaran yang terdiri dari materi ajar, media	Peneliti mengembangkan model design message dalam blended learning. Tujuannya adalah untuk membantu para pendidik untuk memfasilitasi

				<p>presentasi, e-learning, silabus, SAP yang valid, praktis dan efektif. Model Buku dapat digunakan oleh perancang instruksi, konsultan pembelajaran, dan dosen/pendidik dalam membantu peserta didik untuk menginterpretasikan dan mengonstruksi pesan pembelajaran sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menggeneralisasi pembelajaran dan menjadi pembelajar yang mandiri.</p>	<p>peserta didik untuk menafsirkan dan mengkonstruksi bahan ajar. Pengembangannya menggunakan model ADDIE.</p>
3.	<p><i>Student Professional Development: Competency-Based Learning and Assessment</i></p>	<p><i>The Journal of Technology Studies</i> 38, no. 2 (2012): 115–127.</p>	<p>Jacquelyn A. Baughman, Thomas J. Brumm, and Steven K. Mickelson</p>	<p>Hasil penelitian dalam penerapan pembelajaran berbasis kompetensi (CBL) dan penilaian sebagai ukuran pengembangan</p>	<p>Perbedaan yang signifikan dalam nilai rata-rata awal dan akhir yang dinilai digunakan untuk menentukan keuntungan</p>

				profesional mahasiswa.	<p>pengembangan profesional. Temuan menunjukkan bahwa keuntungan profesional yang dinilai sendiri adalah dicapai, hasil yang dinilai sendiri lebih tinggi dari hasil rekan, dan penilaian rekan secara keseluruhan menunjukkan agregat keuntungan dalam pengembangan profesional. Studi kasus ini memberikan kerangka dasar untuk penelitian lebih lanjut studi dalam pembelajaran dan penilaian berbasis kompetensi.</p>
4.	<i>Instructional System Design (ISD): Using the ADDIE Model</i>	<i>Instructional Systems, College of Education, Penn State University, 2000.</i> http://www.seas.gwu.edu/~sbraxton/ISD/general_phases.html	Steven J. McGriff	Hasil penelitian pengembangan terdiri dari beberapa fase Analisis dan Desain. Tujuan pengembangan adalah untuk menghasilkan rencana pembelajaran	Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan rencana pembelajaran dan bahan pembelajaran. Fase pengembangan instruksi, semua media

				dan bahan pembelajaran	yang akan digunakan dalam pembelajaran dan dokumentasi pendukungnya.
5.	<i>Formative Evaluation in the ADDIE Model</i>	<i>Journal of GXP Compliance, Volume 12, Number 4, Summer 2008, pp. 66-73</i>	Gordon Welty	Hasil penelitian dengan evaluasi formatif Model ADDIE, di mana hasil evaluasi formatif dari setiap fase dapat mengarahkan desainer instruksional kembali ke fase sebelumnya. Produk akhir dari satu fase adalah produk awal dari fase berikutnya.	Artikel ini telah meninjau kemungkinan untuk evaluasi formatif program pelatihan juga seperti program lainnya, dalam kerangka model ADDIE. Bisa jadi menyimpulkan bahwa evaluasi formatif pelatihan program dapat memanfaatkan berbagai eksperimen dan desain kuasi-eksperimental, serta apa pun pendekatan lainnya.
6.	<i>The Use Of Addie Model For Designing Blended Learning Application At Vocational Colleges</i>	<i>Asia-Pacific Journal of Information Technology and Multimedia Jurnal Teknologi Maklumat dan Multimedia Asia-Pasifik</i>	Muhamad Azhar Stapa Nazeri Mohammad	Hasil penelitian ini membahas tentang perancangan pembelajaran dan pengembangan prototipe e-learning yang disebut Vocational	Tahap implementasi melibatkan evaluasi formatif dari prototipe yang dikembangkan dan melakukan penyesuaian dan perbaikan jika diperlukan.

	<i>In Malaysia.</i>	<i>Vol. 8 No. 1, June 2019: 49 – 62 e-ISSN: 2289-2192</i>		Learning (Voc-Learning) dengan menggunakan model ADDIE dan diimplementasikan melalui metode blended learning.	Persentase persentase persetujuan ahli menjadi tolak ukur perbandingan.
7.	Penerapan model pembelajaran ADDIE untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada materi kinematika gerak lurus	Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan (JPFK) Vol. 5, No. 1, Maret 2019, pp. 53-XX P-ISSN: 2549-4996, E-ISSN: 2548-5806, DOI: http://doi.org/10.25273/jpfk.v5i1.2947	Haris Rosdianto, Emi Sulistri, Nasa Munandar	Hasil penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan proses sains siswa setelah diterapkan model pembelajaran ADDIE.	Model ADDIE dapat menjadi solusi dalam peningkatan keterampilan proses sains siswa.

Kebaruan dalam penelitian merupakan bagian yang harus dipertimbangkan oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah disertasi. Setelah mengkaji dari beberapa hasil penelitian yang relevan tentang pengembangan model pembelajaran, maka peneliti melaksanakan penelitian dalam pengembangan model pembelajaran mata kuliah perpajakan berbasis kompetensi. Unsur kebaruan penelitian dalam pengembangan model pembelajaran mata kuliah perpajakan berbasis kompetensi, yaitu: 1) produk pengembangan model pembelajaran mata kuliah perpajakan berbasis kompetensi; dan 2) modul perpajakan.

Model pembelajaran dikembangkan dan disusun secara sistematis yang terdiri dari beberapa konten (silabus, standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), isi materi, dan soal-soal latihan praktek). Modul perpajakan sebagai sumber belajar mahasiswa terdiri dari sebelas modul untuk satu semester.

Pengembangan model pembelajaran mata kuliah perpajakan berbasis kompetensi menjadi solusi alternatif pemecahan masalah dalam pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten. Respon dari pimpinan (Ketua, Wakil Ketua I dan Ketua Jurusan STIA Banten) sangat baik dalam pengembangan model pembelajaran mata kuliah perpajakan berbasis kompetensi untuk diimplementasikan. Produk pengembangan model pembelajaran dapat memfasilitasi proses pembelajaran dan sebagai sumber belajar mahasiswa dalam meningkatkan hasil belajar dan kompetensi mahasiswa dengan capaian lulusan yang lebih baik.